

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2021), hlm 5.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Indonesia” (Jakarta: Kemenkumham RI, 2020), hlm 12.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 12.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 15.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 89.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 56.

Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 91.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 60.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 95.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm.39.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (London: Penguin Books, 2004), hlm. 112–120.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 25.

Sahardjo, *Pidato Penganugerahan Doctor Honoris Causa Universitas Indonesia*, 5 Juli 1963.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2004), hlm. 45.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 212.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 89.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 132.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 231.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 98.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm. 135.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm. 140.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 110.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 145.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 198.

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules), 2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 210.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 160.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 1995).

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung" (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), hlm. 1–3.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 163–173.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 2530.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

B. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 72 dan Pasal 73.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 73 ayat (4).